

Indonesian Journal of **ECONOMICS AND BUSINESS** IJEB

- Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Regional Dan Kemiskinan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
SUFIRMANSYAH
- Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Di Jawa Barat Dan Banten)
SILVIANA
- Analisis Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Kasus Pada Bank-bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)
STENLY J. FERDINANDUS
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawaroh Medan
WAN SURYANI
- Stres Peran Wirausaha, Perilaku Inovatif Dan Keberhasilan "Mompreneur" (Penelitian Pada 4 Sentra Usaha Kecil Unggulan Batik Tulis Di Jawa Timur)
TRI SIWI AGUSTINA
- Pengaruh Initial Return, Leverage, Profitabilitas, Earning Per Share Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pasca IPO Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
RIYANTI
- Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Tengah
MUHAMMAD AMIR ARHAM
- Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Penerimaan Zakat Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dari Sektor Zakat Serta Implikasinya Pada Peningkatan Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta
H.M. SYAHRIAH YUSUF
- Pengaruh Kinerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Citra Perusahaan Serta Implikasinya Pada Reputasi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Di Kawasan Industri Provinsi Banten)
DJASURO SURYA
- Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Akuntan Publik Terhadap Tekanan Anggaran Waktu Audit Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar Di BAPEPAM-LK)

I J E B

Indonesian Journal Of Economics And Business

Dewan Pengarah (<i>Steering Board</i>)	: Mahfud Arifin Sulaeman Rahman Nidar
Dewan Editor (<i>Editorial Board</i>)	
Ketua Editor (<i>Editor in Chief</i>)	: Fery Hadiyanto
Editor Pelaksana (<i>Managing Editor</i>)	: Budi Harsanto
Editor Penasehat (<i>Editorial Advisory Board</i>)	: Erie Febrian Universitas Padjadjaran Nanny Dewi Tanzil Universitas Padjadjaran Kodrat Wibowo Universitas Padjadjaran Bagja Muljarjadi Universitas Padjadjaran
Editor Teknik (<i>Technical Editor</i>)	: Nanny Dewi Tanzil Anas
Koordinator Manuskrip (<i>Manuscript Coordinator</i>)	: Trisatya Movy Yosida Suhardiman
Direktur Publikasi (<i>Publications Director</i>)	: Asep Abdul Hafid Yunus
Manager Produksi (<i>Productions Manager</i>)	: Dede Yudi Wahyudi
Editor Bahasa Inggris (<i>English Language Editor</i>)	: Alison
Layout & Printing	: Sona Sonjaya [PT Minaret Prima Solusa]
Desain Cover	: Alief Firmansyah Syaiful

ALAMAT REDAKSI & ADMINISTRASI

Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur 35 Bandung 40132
Phone : +62-22-2504970 line 209, Fax : +62-22-2509534
E-mail : publikasi@pasca.unpad.ac.id / publikasi.pps@gmail.com
Website : <http://jurnal.unpad.ac.id/ijeb>

[Terbit tiga kali dalam satu tahun : April, Agustus dan Desember]

Setiap penulis dalam jurnal ini akan memperoleh 1 (satu) eksemplar tulisannya dan bagi yang berminat untuk mendapatkan jurnal ini dapat berhubungan dengan Bagian Administrasi Indonesian Journal of Economics and Business, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Kata Pengantar

Pembaca Indonesian Journal of Economics and Business yang terhormat,

Indonesian Journal of Economics and Business (IJEB) merupakan pengembangan dari jurnal Wacana Ekonomika yang terdahulu. IJEB merupakan jurnal ilmiah triwulan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Peningkatan kualitas dan kuantitas menjadi komitmen kami dalam penerbitan jurnal ini.

Pada edisi kedua tahun 2013 ini, ada 10 penulis utama yang menyajikan artikelnya. Beragam topik tertuang dalam edisi ini meliputi penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis dengan beragam tema tentang pengaruh desentralisasi fiskal, penerapan sistem informasi akuntansi, penghimpunan dana dan penyaluran kredit, stres peran wirausaha, perilaku inovatif dan keberhasilan "*mompreneur*", faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan penerimaan zakat dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, dll.

Untuk semakin meningkatkan khasanah ilmiah kita, terutama dalam bidang Ekonomi dan Bisnis, maka redaksi mengharapkan pada penerbitan berikutnya akan lebih beragam lagi artikel yang disajikan.

Bandung, Agustus 2013
Salam ilmiah,

Dewan Editor

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Regional Dan Kemiskinan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam SUFIRMANSYAH	61 - 67
Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota Di Jawa Barat Dan Banten) SILVIANA	68 - 77
Analisis Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Suatu Kasus Pada Bank-bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010) STENLY J. FERDINANDUS	78 - 86
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawaroh Medan WAN SURYANI	87 - 94
Stres Peran Wirausaha, Perilaku Inovatif Dan Keberhasilan "Momprenneur" (Penelitian Pada 4 Sentra Usaha Kecil Unggulan Batik Tulis Di Jawa Timur) TRI SIWI AGUSTINA	95 - 101
Pengaruh <i>Initial Return, Leverage, Profitabilitas, Earning Per Share</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Return Saham</i> Pasca IPO Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia RIYANTI	102 - 106
Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Tengah MUHAMMAD AMIR ARHAM	107 - 112
Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Penerimaan Zakat Dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dari Sektor Zakat Serta Implikasinya Pada Peningkatan Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta H.M. SYAHRIAL YUSUF	113 - 121
Pengaruh Kinerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Citra Perusahaan Serta Implikasinya Pada Reputasi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Di Kawasan Industri Provinsi Banten) DIASURO SURYA	122 - 137
Pengaruh Fee Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Akuntan Publik Terhadap Tekanan Anggaran Waktu Audit Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar Di BAPEPAM-LK) SURTIKANTI	138 - 147

DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD AMIR ARHAM

Universitas Negeri Gorontalo

email korespondensi: amier_archam@yahoo.com

Abstract

The principle of fiscal decentralization aimed to optimize empowerment, increased well-being and promote regional competitiveness through the effective and efficient public services. However, fiscal decentralization journey that has lasted more than 10 years is still causing the pros and cons, some of the shows there but not the least successful shows on the contrary, on the basis that the study was conducted. The purpose of the study, 1. To see whether the effect of fiscal decentralization on poverty in Sulawesi Tengah, 2. What factors are the most dominant influence on poverty in Sulawesi Tengah. The method of analysis used, the panel data merging between time series (2001 - 2010) with a cross section of eight (8) districts / municipalities in Central Sulawesi. The study results indicate that the negative correlation of fiscal decentralization on poverty in Central Sulawesi during the implementation of regional autonomy. While the most dominant factor influencing poverty in the district / town in Sulawesi Tengah, the populations are positively correlated.

Keywords: Fiscal Decentralization and Poverty

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, ada dua hal pokok yang perlu dicermati, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD pada prinsipnya merupakan gambaran kemampuan suatu daerah otonom dalam aspek fiskal, karena itu idealnya pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar mandiri. Nilai PAD semua daerah otonom di Sulawesi Tengah terus meningkat setiap tahun, akan tetapi belum mampu membiayai lebih dari separuh pengeluarannya sendiri sebagaimana tujuan desentralisasi. Proporsi PAD terhadap APBD masih relatif kecil dibandingkan dengan transfer dari pusat. Mahi (2006) menunjukkan bahwa selama tahun 2001–2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Proporsi transfer dari pusat terhadap penerimaan daerah masih yang terbesar dibandingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, sehingga tujuan pelaksanaan desentralisasi masih jauh dari yang diharapkan. Hasil studi Adi (2005), Wirawan dan Adi (2007) memperkuat argumentasi tersebut bahwa kemandirian daerah bukan makin membaik, malah sebaliknya yaitu ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat menjadi semakin tinggi.

Sementara Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) merupakan bagian dari penerimaan daerah atau mekanisme transfer pemerintah pusat ke daerah, secara umum dana PKPD terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*). Abimanyu (2000:1) Ehtisham dan Ali (2002:14), tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka desentralisasi yaitu untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*). Akan tetapi kebijakan desentralisasi fiskal

yang telah berjalan belum mampu mengurangi ketimpangan. Hasil penelitian Brodjonegoro, et. al (2001), Dartanto dan Brodjonegoro (2003), Waluyo (2007) serta Nugrahanto dan Muhyiddin (2008) menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi ketimpangan antardaerah.

Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana PKPD dan pengumpulan dana non PKPD pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi yang lain dapat memperburuk ketimpangan antardaerah. Belum lagi perilaku sebagian besar pejabat daerah diketemukan dana PKPD lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan konsumtif, hanya sebagian untuk kegiatan produktif yang berdampak terhadap peredaran uang yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Brandt dan Zhu (2000) di China bahwa periode desentralisasi ekonomi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun disertai dengan percepatan inflasi atau bersifat *inflationary*.

Selanjutnya, untuk analisis secara spesifik penulisan studi ini difokuskan di Provinsi Sulawesi Tengah, karena wilayah ini menggambarkan beragam permasalahan sekalipun memiliki banyak potensi, serta kewenangan yang luas diberikan selama pelaksanaan otonomi daerah. Pertumbuhan dan struktur perekonomian Indonesia secara spasial, kontribusi Sulawesi Tengah terhadap kawasan/pulau Sulawesi, menyumbang 15,5 %, dan secara nasional hanya menyumbang 0,7 % terhadap pembentukan PDB. Sedangkan ekspor Indonesia menurut provinsi asal barang dari Sulawesi Tengah hanya sebesar 0,19 % lebih rendah dari provinsi lainnya di Sulawesi (BPS, 2011). Disisi lain berdasarkan ukuran kesejahteraan masyarakat seperti PDRB pada kenyataannya meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi beberapa indikator sosial ekonomi masih menyisakan masalah, seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Indikator Sosial Ekonomi Sulawesi Tengah

Indikator sosial Ekonomi	Jumlah	Persen/Peringkat
Kemiskinan	474,9 ribu jiwa	18,07 % (24)
Indeks Pembangunan Manusia	70,09	(22)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Metode

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keuangan daerah dan perekonomian daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dimana dikabupaten/kota dijadikan sebagai objek, karena titik tekan pelaksanaan otonomi daerah diletakkan pada daerah kabupaten/kota. Keuangan daerah tercermin dari struktur penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD setiap tahunnya selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan periode tahun 2001 - 2010. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah terdiri dari 11 kabupaten/kota. Meskipun demikian tidak semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah dimasukkan sebagai unit analisis, kabupaten/kota hasil pemekaran pada periode awal penelitian tidak termasuk di dalamnya. Sehingga jumlah unit analisis kabupaten/kota sebanyak 8 kabupaten/kota.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelatif, penelitian korelatif untuk mencari keterkaitan hubungan fakta-fakta dalam fenomena yang diteliti kemudian mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena tersebut, seperti variabel-variabel pengaruh desentralisasi fiskal dan variabel lainnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Pendekatan Estimasi Dan Model Analisis

Estimasi Model

Studi mengenai kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan mengacu pada model yang dilakukan oleh Joassart-Marcelli (2004). Selanjutnya model tersebut dikembangkan dan merubah beberapa variabel yang relevan. Adapun model dasar yang akan dikembangkan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan, yaitu:

$$POVERTY_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PDRBCap_{it} + \alpha_2 UNEMP_{it} + \alpha_3 POP_{it} + \alpha_4 IKF_{it} + \alpha_5 DESTEXP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana

POVERTY = Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Waktu t

UNEMP = Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota, Waktu t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota, Waktu t

POP = Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota, Waktu t

IKF = Indeks Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota, Waktu t

DESTEXP = Desentralisasi Fiskal (Belanja Langsung) di Kabupaten/Kota, Waktu t

ε = Error Term

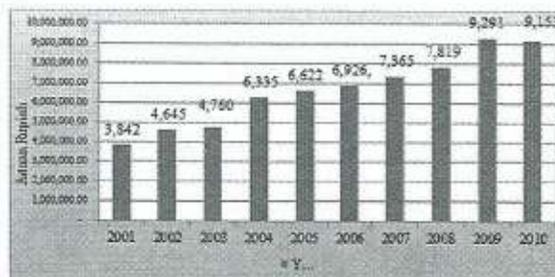
Model Analisis

Pemecahan masalahnya digunakan model ekonometrika dengan menggunakan panel data, yaitu gabungan data runtun waktu (*time series*) selama 10 tahun dan data silang (*cross-section*) sebanyak 8 kabupaten/kota. Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek, atau meliputi beberapa waktu, dan data silang terdiri atas beberapa objek atau banyak objek (Gujarati, 2003). Panel data mempunyai keuntungan: dapat memberikan informasi yang lebih banyak variabilitas, memperkecil multikoleniaritas antara variabel, lebih banyak derajat bebas, serta lebih efisien.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif

Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Perkembangan PDRB perkapita Sulawesi Tengah yang mencerminkan perbandingan kemampuan daya beli penduduk disuatu daerah menunjukkan trend yang baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal (2001 – 2010). Simak grafik 4.1 berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

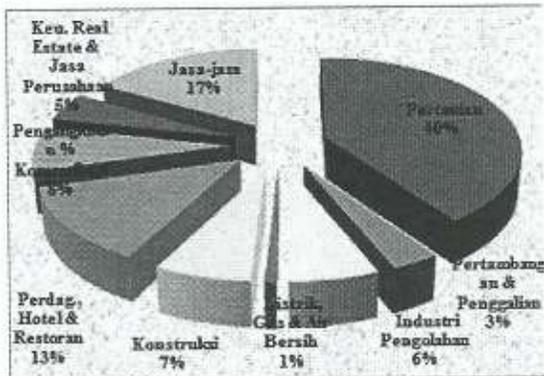
Grafik 1. Perkembangan PDRB Perkapita Sulawesi Tengah 2001 – 2006 (Jutaan Rupiah)

Grafik 1 menunjukkan perkembangan PDRB perkapita Sulawesi Tengah selama periode 2001 – 2010. Pada tahun 2001 nilai PDRB perkapita Sulawesi Tengah sebanyak Rp. 3,842 juta, pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 4,645 juta. Tahun 2003 sebanyak Rp. 4,760 juta, tahun 2004 sebanyak Rp. 6,335 juta, tahun 2005 sebanyak Rp. 6,622 juta, sampai akhir 2010 PDRB perkapita Sulawesi Tengah mencapai Rp. 9,153 juta, sedikit menurun dibandingkan tahun 2009, yaitu sebanyak Rp. 9,291 juta.

Selanjutnya akan dideskripsikan distribusi persentase PDRB secara sektoral yang menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar Persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Perkembangan berbagai sektor ekonomi selama tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang berarti, sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar perannya terhadap perekonomian Sulawesi Tengah pada tahun 2010 tumbuh 6,00 %, di mana sebelumnya tumbuh 6,39. Berbagai faktor lain yang ikut mendukung pertumbuhan sektor pertanian, adalah makin kondusifnya keamanan secara keseluruhan di Sulawesi Tengah, stabilnya harga, makin efektifnya pelaksanaan pembangunan pasca krisis, dan penerapan otonomi daerah. Selain sektor pertanian sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan turut mendominasi kehidupan perekonomian daerah Sulawesi Tengah.

Sektor Pertanian yang memberikan andil 41,12 % tahun 2009 turun menjadi 40,44 % tahun 2010 (Grafik 4.2), namun tetap merupakan sektor terbesar dalam memberikan andilnya terhadap PDRB Sulawesi Tengah. Sektor jasa-jasa memberikan andil sebesar 16,55 %, sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan andil sebesar 13,11 %, sektor angkutan dan komunikasi, bangunan, dan industri pengolahan masing-masing memberikan andil sebesar 7,64 %, 6,88 %, dan 6,36 %. Selanjutnya sektor-sektor yang lain memiliki andil di bawah lima persen, seperti sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan sebesar 5 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3 % dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1 % dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci distribusi Persentase PDRB Sulawesi Tengah pada akhir periode penelitian dapat disimak pada grafik 2 berikut ini.

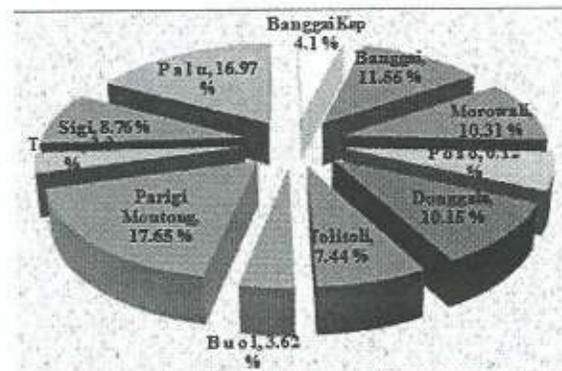


Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Grafik 2. Distribusi Persentase PDRB Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah, 2010 (Persen)

Sementara distribusi atau peranan pembentukan PDRB di Sulawesi Tengah menurut kabupaten/kota, dari 11 kabupaten/kota perannya berbeda satu sama lain, dimana Kabupaten Parigi Moutong memberikan peranan terhadap pembentukan PDRB di Sulawesi Tengah terbesar, dan Kabupaten Tojo Una-Una memberikan peranan PDRB terkecil. Secara rinci distribusi PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2010 dapat disimak pada grafik 3. Tahun 2010 ditampilkan secara grafis dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan perekonomian kabupaten/kota di Sulawesi Tengah

saat ini.



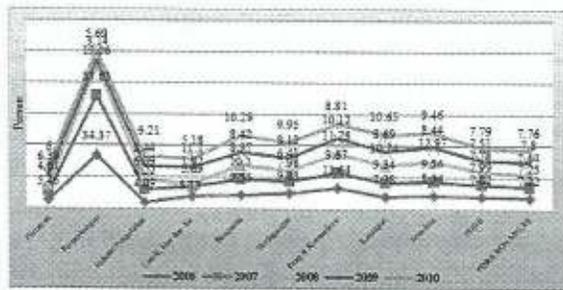
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah.

Grafik 3. Distribusi Persentase Terhadap Total PDRB Seluruh Kab/Kota di Sulawesi Tengah Atas Dasar Berlaku, 2010

Peranan pembentukan atau distribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada berdasarkan harga berlaku tahun 2010, Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang memberikan peranan terbesar, yaitu 17,68 %, berturut-turut Kota Palu sebesar 16,97 %, Kabupaten Banggai sebesar 11,55 %, Kabupaten Morowali 10,51 %, Kabupaten Donggala sebesar 10,15 %, Kabupaten Sigi 8,76 %, Kabupaten Toli-Toli sebesar 7,44 %, Kabupaten Poso sebesar 6,12 %, Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 4,1 %, Kabupaten Buol sebesar 3,62 % dan terendah Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,3 %.

Secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak Rp. 6.346.245, Kota Palu sebanyak Rp. 6.102.417, Kabupaten Banggai sebanyak Rp. 4.155.714. Kabupaten/kota yang memiliki PDRB terkecil adalah Kabupaten Tojo Una-Una dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 1.197.729. Ketiga daerah otonom yang memiliki peranan kecil terhadap pembentukan PDRB merupakan wilayah pemekaran (daerah otonom baru), meski demikian tidak dapat disimpulkan bahwa daerah otonom baru karakteristiknya relatif sama, karena Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki peranan yang terbesar terhadap pembentukan PDRB di Sulawesi Tengah juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala pada tahun 2003.

Struktur perekonomian Sulawesi Tengah terdapat dua sektor dominan dengan andilnya di atas 10 persen, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor bangunan. Sementara sektor pertambangan dan penggalian, komoditi sektor ini seperti pasir kuarsa, nikel, sirtu merupakan salah satu komoditi andalan baik diekspor antar pulau maupun digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Dengan masuknya migas sebagai salah satu komoditas andalan, sektor ini akan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Namun sektor potensi ini di Sulawesi Tengah perannya relatif masih kecil, serta pertumbuhannya mengalami penurunan. Simak grafik 4.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah.

Grafik: 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Sektor, 2006-2010 (Persen)

Grafik 4 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha (sektor) selama lima tahun terakhir periode penelitian (2006 – 2010). Sektor pertanian pertumbuhannya relatif stabil selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 5%. Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2006 dan 2007 tumbuh di atas 30 % yang dipicu oleh besarnya produksi sub sektor migas, namun tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2009 hanya tumbuh sebesar 3,14 %, dan tahun 2010 tumbuh sebesar 5,69 %.

Sektor industri pengolahan pertumbuhannya fluktuatif, pada tahun 2006 hanya tumbuh 4,09 %, pada tahun 2007 meningkat sebesar 8,22 % dan pada tahun 2008 menurun kembali menjadi 6,39 %. Pada tahun 2010 hanya tumbuh sebesar 6,21 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini dirasakan melambat dan relatif sama setiap tahunnya padahal tumpuan transformasi ekonomi diharapkan pada sektor ini. Dilihat dari peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian hanya 7,63 persen pada tahun 2010 menempatkan Sulawesi Tengah berada pada daerah non industrialisasi dengan pangsa NTB lebih kecil dari 10 persen. Sektor bangunan mengalami hal serupa cenderung fluktuatif akan tetapi fluktuasinya tidak terlalu melebar setiap tahun yang berada disepertaran pertumbuhan 8 dan 10 %.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2006 sebesar 9,83 % dan pada tahun 2010 pertumbuhannya sebesar 9,95 %. Sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhannya juga berfluktuatif, pada tahun 2001 sektor utilitas ini pertumbuhannya mencapai 8,13 % namun tahun-tahun berikutnya menurun, dan pada tahun 2010 tumbuh 5,18 %. Sementara sektor-sektor yang bersifat non tradeable seperti sektor pengangkutan, komunikasi, sektor keuangan dan persewaan, dan sektor jasa-jasa pertumbuhannya relatif baik, akan tetapi elastisitas terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kurang baik.

Analisis Hasil Estimasi

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh hasil regresi seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Estimasi Persamaan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.13869	72.32153	-2.922877	0.0047
LOG(PDRBCAP?)	-56.18848	81.57829	-0.688768	0.4933
LOG(POP?)	28.16241	84.43371	3.335446	0.0014
UNEMP?	6.404479	2.672372	2.396552	0.0193
IKF?	-0.894257	0.378856	-2.360416	0.0212
DESTEXP?	-7.049561	3.485320	-2.022644	0.0471
R-squared	0.939207			
F-statistic	86.25861			

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa faktor-faktor pendapatan perkapita masyarakat (PDRBCap), jumlah populasi (POP), tingkat pengangguran (UNEMP), kapasitas fiskal suatu daerah (IKF) dan desentralisasi pengeluaran (DESTEXP). Dari kelima variabel independen hanya satu yang tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Faktor pendapatan perkapita tidak memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi, sementara faktor-faktor lain seperti faktor jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, memperlihatkan koefisien regresi sebesar 28.16241, hal ini berarti bahwa jika jumlah penduduk meningkat sebesar 10 % maka akan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 28,162 %, faktor pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan memperlihatkan koefisien sebesar 6.404479, berarti bahwa jika angka pengangguran meningkat sebesar 1 % maka akan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 6.4044 %, faktor kapasitas atau kemampuan fiskal daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, memperlihatkan koefisien sebesar -0.894257, hal ini berarti bahwa jika kapasitas fiskal daerah meningkat sebesar 1 % maka akan mengakibatkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,89 %, faktor desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, memperlihatkan koefisien regresi sebesar -7.049561, hal ini berarti bahwa jika rasio pengeluaran pemerintah daerah meningkat sebesar 1 % akan mengakibatkan penurunan angka kemiskinan sebesar 7,05 % di kabupaten/kota Sulawesi Tengah.

Selanjutnya dilakukan uji kesesuaian model digunakan uji F untuk mengambil kesimpulan apakah variabel-variabel independen mempengaruhi secara signifikan secara serempak terhadap variabel dependen (kemiskinan). Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai *R-Squared* sebesar 0.939207, artinya bahwa 93,92 % model dapat dijelaskan dengan baik sementara sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diperhitungkan dalam model.

Pengujian Hipotesis

a.1. Uji-F, digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara

serempak. Hasil uji-F persamaan menunjukkan angka sebesar 86.25861 yang mana angka tersebut berada di atas F-tabel (3,53) pada tingkat signifikan satu persen dan $df_1 = 4 (k - 1 = 5 - 1)$; $df_2 = 75 (n - k = 80 - 5)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, pergeseran sektor primer (PSP).

a.2. Uji-t, digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel PDRBCap, memiliki t-hitung sebesar -0.688768, yang lebih kecil dari t-tabel (1,980), sedangkan variabel POP memiliki t-hitung sebesar 0.447989 pada tingkat signifikan sepuluh persen dan degree of freedom (df) sebesar 74 ($n - k - 1 = 80 - 5 - 1$), yang berarti bahwa variabel PDRBCap, secara individual tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan (POV), sedangkan variabel-variabel jumlah populasi, pengangguran, indeks kapasitas fiskal dan desentralisasi fiskal masing-masing memiliki t-hitung sebesar 3.335446, 2.396552, -2.360416 dan -2.022644 yang lebih besar dari t-tabel (1,980). Artinya bahwa variabel-variabel tersebut secara individu mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi bahwa pendapatan perkapita atau kemampuan daya beli masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya disparitas pendapatan, dalam artian bahwa perubahan daya beli masyarakat jika terjadi peningkatan terkonsentrasi pada orang atau kelompok tertentu sehingga dampaknya bagi orang banyak sangat kecil mempengaruhi terhadap kemiskinan yang ada. Hasil ini sejalan dengan temuan Becerra dan Popa (2006) dimana pendapatan perkapita cenderung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Ini juga merupakan indikasi penting bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan karena besar kemungkinan angka pengangguran sangat tinggi, sementara lapangan kerja sangat sedikit. Hal ini ditunjukkan dari hasil estimasi dimana angka pengangguran berkorelasi positif terhadap kemiskinan, bukti empiris ini sangat logis pengangguran yang tinggi sudah barang tentu akan menciptakan kemiskinan.

Faktor demografi sangat penting dan berpengaruh terhadap angka kemiskinan, makin besar jumlah penduduk maka peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai modal (*capital*) lebih besar, sehingga akan berdampak terhadap akumulasi modal. Namun faktor demografi dapat menjadi anomali di dalam sebuah negara (daerah) jika kemampuan produktifitasnya sangat rendah, penambahan jumlah penduduk justru cenderung akan menjadi beban pembiayaan untuk penyediaan layanan publik sehingga korelasi terhadap kemiskinan bersifat positif. Dari hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan kecenderungan tersebut bahwa peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan angka kemiskinan meningkat, temuan ini sejalan dengan bukti empiris dari Joassart-Marcelli et. al., (2004) dengan adanya peningkatan jumlah penduduk angka kemiskinan di

wilayah selatan California USA juga meningkat.

Kemampuan kapasitas fiskal di suatu daerah memiliki peran penting mendorong penurunan angka kemiskinan, hasil estimasi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah maka peluang untuk mendorong penurunan kemiskinan juga makin besar. Bukti empiris ini searah dengan temuan Joassart-Marcelli et. al., (2004) kapasitas fiskal cenderung menurunkan angka kemiskinan regional.

Sementara desentralisasi fiskal dalam bentuk pengeluaran korelasinya negatif terhadap kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah selama periode penelitian, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yao (2006) bahwa desentralisasi fiskal memiliki peranan penting untuk menurunkan kemiskinan, temuan yang sama dari Jütting et. al (2004) desentralisasi telah membantu untuk mengurangi kemiskinan baik melalui peningkatan partisipasi, penurunan kerentanan atau peningkatan akses ke layanan.

Simpulan

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal dalam bentuk desentralisasi pengeluaran dapat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah selama pelaksanaan otonomi daerah. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah perlu memperbesar pengeluaran ke sektor-sektor yang memiliki korelasi kuat untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, yakni jumlah populasi yang berkorelasi positif. Dengan demikian faktor demografi di Sulawesi Tengah diperlukan peningkatan produktifitas sehingga kemungkinannya tidak bersifat anomali terhadap kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Adams Jr., R. H and J. Page. 2003, "Poverty, Inequality and Growth in Selected Middle East and North African Countries, 1980-2000", *Journal World Development*, Vol. 32, No. 2, P. 2027-2048.
- Adi, Priyo Hari (2005), "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XVII, No. 2-3. Program Pascasarjana UKSW, Salatiga.
- Akai, Nabuo & Sakata, Masayo, (2002), "Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for the United States", *Journal of Urban Economics*, Vol. 52, No. 1, P. 93-108.
- Akai, Nabuo, et. al., (2009), "Fiscal Decentralization and Economic Volatility; Theory and Evidence from State Level Cross-Section Data for the United States", *Journal Japanese Review*, Vol. 60, No. 2, P. 233-235.
- Anggito Abimanyu, 2000, "Meminimumkan Resiko Desentralisasi; Pendekatan Kebijakan Fiskal", Makalah Seminar Menyelamatkan Otonomi Daerah", Jakarta, KPEN-KADIN-CSIS dan LPEM FEUI.

- Bambang P.S. Brodjonegoro, et.al., 2001, "Model Ekonometrika Desentralisasi Fiskal: Analisa Dampak Alokasi SDA dan DAU Terhadap Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah", LPEM FEUI, Jakarta, Paper Seminar.
- Becerra Lorena & Popa, Sinziana, 2006, "Decentralization and Poverty Alleviation" Department of Political Science Duke University.
- Bordman, Phillip & Ford, Kathryn, 2006, "Fiscal Decentralisation and Economic Growth in the OECD", Brisbane Queensland University Australia, Macroeconomics Research Group.
- Brandt, Lorent & Zhu, Xiaodong, (2000), "Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China Under Reform", *Journal of Political Economy*, Vol. 108, No. 2, P. 422 - 451.
- Dartanto Teguh & Brodjonegoro, Bambang P. S., (2003), "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1. Hal. 17 - 38.
- Ding, Ying, 2007, "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994-2002", *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, Vol. 5, No. 3, P. 243 - 260.
- Ehtisham, Ahmad & Mansoor, Ali., 2002, "Indonesia: Managing Decentralization", In Ehtisham Ahmad dan Vito Tanzi". Editor. Managing Fiscal Decentralization. London: Routledge.
- Gujarati, Damodar. N., 2003, *Basic Econometrics*, (4th edition), New York, McGraw-Hill.
- Iimi, Atsushi, (2005), "Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note", *Journal of Urban Economics*, Vol. 57, No. 3, P. 449.
- Joassart-Marcelli, Pascale, et. al., 2004, *Fiscal Consequences of Concentrated Poverty in A Metropolitan Region*, *Annals, Association of American Geographers*, University of Massachusetts, Boston
- Jütting, 2004, "Decentralisation and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact", OECD Development Centre, Working Paper No. 236.
- Kraay, Aart, 2004, "When is Growth Pro-Poor? Evidence from Panel Countries", Policy Research Working Paper 3225, World Bank, December.
- Mahi, Raksaka, (2006), "Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Hal. 39 - 49.
- Martinez-Vasquez, Jorge & McNab, Robert M., (2001), "Fiscal Decentralization and Economic Growth", *Journal World Development*, Vol. 31, No. 9, P. 1597 - 1616.
- Nanga, Muana, 2005, "Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan", Institut Pertanian Bogor, Disertasi Tidak Dipublikasikan.
- Gates, Wallace E., 2006, *On the Theory and Practice Fiscal Decentralization*, University of Maryland, Department of Economics.
- Phillip, Abachi Terhemen & Isah, Salamatu, 2012, "An Analysis of the Effect of Fiscal Decentralisation on Economic Growth in Nigeria", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2, No. 8, P. 141 - 149.
- Samimi, Ahmad Jafari et.al, (2010), "Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 4, No. 11, P. 5490-5495.
- Stansel, Dean, (2005), "Local Decentralization and Local Economic Growth: A Cross-Sectional Examination of US Metropolitan Areas", *Journal of Urban Economics*, Vol. 57, P. 55 - 72.
- Tiebout, Charles., (1956), "A Pure Theory of Local Expenditures", *Journal of Political Economy*, Vol. 64, No. 5, P. 416 - 424.
- Waluyo, Joko, 2007, "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia, UI - Depok, Makalah Panel Discussion, 12 Desember.
- Widhiyanto, Iman, (2008), "Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004)", *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Hal 19 - 53.
- Wirawan, Setiaji & Adi, Priyo Hari, 2007, "Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?", Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Zhu, Hengpeng, (2004), "Regional Decentralization, Fiscal Incentives and Privatization of Public-Owned Enterprises", *Journal China & World Economy*, Vol. 12, No. 6, P. 24 - 37.



Program Pascasarjana
Universitas Padjadjaran (Unpad)
Jl. Dipati Ukur no. 35 Bandung 40135 - Indonesia
Phone : +62-22-2504970, Fax : +62-22-2509534
E-mail: ppas@unpad.ac.id